

ABSTRAK

Nurul Israj, Muhlis Madani dan Iswadi Amiruddin. Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pengawasan Reklame di Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penertiban dan pengawasan reklame di Kabupaten Enrekang berdasarkan enam indikator teori Van Meter dan Van Horn, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan terdiri atas enam orang, yaitu staf Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, anggota Satuan Polisi Pamong Praja, serta dua pelaku usaha reklame.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban dan pengawasan reklame di Kabupaten Enrekang telah berjalan cukup baik, tetapi belum optimal. Pada aspek standar dan sasaran kebijakan, pelaksanaan telah mengacu pada peraturan yang berlaku dan standar operasional prosedur (SOP), namun masih ditemukan beberapa reklame yang belum memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Pada aspek sumber daya, keterbatasan personel, kendaraan, dan fasilitas operasional masih menjadi hambatan. Komunikasi antarorganisasi telah dilakukan melalui koordinasi dan pertukaran informasi, meskipun sinkronisasi data masih perlu diperkuat. Pada aspek karakteristik agen pelaksana, pembagian tugas telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing, namun koordinasi masih perlu ditingkatkan. Kondisi sosial dan ekonomi ditandai dengan masih relatif rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha terhadap ketentuan penyelenggaraan reklame.

Sementara itu, disposisi pelaksana menunjukkan adanya komitmen dalam melaksanakan penertiban dan pengawasan reklame, tetapi pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan tingkat kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fasilitas, koordinasi, integrasi pelayanan, serta kepatuhan pelaku usaha untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, penertiban, pengawasan reklame